

FUNGSI PENGAWASAN CAMAT UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA

Norma Mewengkang

Abstract:

sub district head as the head of the unit of work in a sub district supervisory functions as the roles to improve effectiveness and efficiency of the work of employees concerning the services that come into contact with the community. The purpose of this research is to know the description of the function of supervision of the sub district head to increase the efficiency and effectiveness of work of employees in the sub district Kawangkoan Minahasa regency

This research uses Qualitative Descriptive method where data retrieval in field or object of research data collected by researchers in person with the intention of directly spaciousness. The determination of sample respondents conducted in purposive sampling where writers/researchers specify or choose deliberately against the sample of respondents that add up to 17 people

The supervisory function of the sub district head in the improvement of work productivity in the Government apparatus sub district Kawangkoan views efficiency and effectiveness is already well underway. This is apparent in the management control through the Organization, in the implementation of policies, procedures and job duties. Several other factors that have not been fullest including mental attitude is still lacking but if any deficiencies there may be clear in the implementation of the duties and responsibilities of the employees will be the maximum so that it will have an effect on the success of the tasks performed, both in the areas of governance, development, community, and other administrative tasks.

Keywords: *supervision, efficiency, effectiveness*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, isu-isu pemerintahan yang baik semakin berkembang ditengah-tengah masyarakat, seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan Negara. Arah dan proses reformasi, demokratisasi, dan desentralisasi yang diterapkan seolah-olah semakin jauh dari apa yang diharapkan, bahkan memunculkan berbagai macam persoalan baik pada peranan pemerintahan ditingkat lokal dan regional. Konflik horizontal, maraknya praktek KKN, dalam berbagai instansi pemerintahan lokal, buruknya kualitas pelayanan birokrasi publik dan lain sebagainya merupakan contoh konkrit berbagai permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah kita saat ini.

Di bidang politik, perubahan lainnya yang terjadi berkaitan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat (public) untuk mewujudkan suatu system politik baru yang bisa terjamin terselenggaranya kehidupan Negara (pemerintahan) yang mencerminkan

demokrasi secara menyeluruh dan utuh. Berhubungan dengan hal diatas, maka pemerintah selaku panutan dan abdi masyarakat harus mampu meningkatkan kinerjanya, agar fungsi-fungsi dari lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja pegawai, maka perilaku kepemimpinan pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah selalu berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, agar terwujud suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintahan memberikan arahan bahwa pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada kualitas, efisien dan efektifitas seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian dan kesejahteraan aparatnya, sehingga keseluruhan aparatnya semakin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta

menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dalam pemerintahan, pemerintah diharapkan dapat menciptakan aparatur yang lebih efisien dan efektif serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat Bangsa dan Negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemerintah senantiasa dituntut untuk mengupayakan penertiban, pendayagunaan serta penyempurnaan di bidang aparatur pemerintah demi terciptanya suatu aparatur pemerintah yang siap untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dalam menghadapi masalah yang akan muncul pada saat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan prestasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas kerja pegawai untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan seorang pemimpin instansi yang mampu mempengaruhi perilaku pada pegawai/bawahannya sehingga mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai abdi masyarakat, dapat ditegaskan kembali bahwa setiap pegawai mempunyai kesediaan untuk bekerja keras, menggunakan potensi yang ada pada dirinya, berinisiatif dan berkreasi, jika pemimpin mampu mendorong, mengerakkan dan mengarahkan perilaku para bawahannya sekaligus memberikan motivasi ke arah peningkatan prestasi kerja mereka.

Dalam pelaksanaan pembangunan, peranan aparatur pemerintah perlu ditingkatkan guna memasuki pembangunan di

era globalisasi yang bergerak cepat sesuai dengan tuntutan dan semangat otonomi daerah. Oleh sebab itu aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta mampu melihat permasalahan yang timbul dalam masyarakat bawah.

Untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam memasuki proses pembangunan global maka para aparatur pemerintah dituntut memiliki sikap dan perilaku yang baik, loyalitas, jujur, bertanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan menjadi pengayom kepada masyarakat dengan memiliki hati nurani yang bersih. Oleh karena itu perlu diupayakan penataan kewenangan diantara jajaran perangkat aparatur pemerintah sehingga dapat terlaksana penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Sehubungan dengan arah pembangunan aparatur Negara, maka kebijakan dan langkah-langkah aparatur Negara perlu untuk terus ditingkatkan, terutama untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan Wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan yang mengarah kepada korupsi, pungutan liar serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan, yang dapat merusak citra dan integritas aparatur pemerintah dimata masyarakat.

Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan diperlukan agar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kinerja aparatur pemerintah dapat terkontrol serta dapat bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan pengawasan ini semua bentuk-bentuk penyelewengan dan penyimpangan dapat terhindari.

Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi

penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas

Menurut Steers (1985) “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedang Efisiensi adalah ketepatan cara (kerja, usaha) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. (Mulyadi, 2007)

Inpres No 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, menegaskan perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi atau satuan kerja terhadap bawahannya. Camat, selaku kepala Wilayah dan pimpinan satuan kerja dikantor kecamatan merupakan penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan aparatur atau pegawai dikantor kecamatan, yang memiliki tanggung jawab pengawasan melekat terhadap bawahannya demi terciptanya keberhasilan kegiatan di wilayahnya.

Fungsi pengawasan itu sendiri adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan. Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (Muchsana dalam Siswanto Sunarno, 2005)

Dalam pelaksanaan pengawasan, ditentukan penilaian apakah pengawasan melekat (system pengendalian management) itu telah disusun dan dilakukan dengan baik oleh pemimpin atau atasan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan secara tepat

dan terpadu. Sistem itu yang akan menilai apakah kualitas pengawasan itu benar-benar dilakukan oleh petugas secara benar dan objektif atau hanya sekedar saja, oleh karena itu Hasil dari pengawasan itu dapat dilihat apakah ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada kerugian keuangan Negara yang mengarah kepada korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemborosan Waktu, juga bersamaan dengan itu dapat dinilai perilaku dari petugas atau pegawai berkenaan dengan ketaatan dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan melekat itu bermaksud untuk mengoptimalkan fungsi management pada kepala satuan kerja/ pimpinan untuk mengawasi kinerja aparatnya. Dari uraian diatas, jelaslah pengawasan melekat sebagai bagian dari fungsi manajemen perlu dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan wewenang atau dengan kata lain pengawasan melekat ini, mengontrol dan membuat kinerja aparat pemerintah maksimal dan efisien. Pengawasan melekat yang biasa juga disebut pengendalian manajemen dapat dilakukan melalui jalur sebagai berikut: organisasi, kebijaksanaan, prosedur, rencana kerja, pencatatan dan pelaporan, dan pembinaan personal.

Pengawasan melekat harus bersifat membina, karena penentuan adanya suatu penyimpangan harus didasarkan pada kriteria yang jelas, dan penyimpangan harus dideteksi secara dini, Juga tindak lanjut terhadap temuan-temuan pengawasan harus di analisis sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dapat menjadi bahan evaluasi untuk dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan di waktu yang akan datang. Pengawasan melekat adalah merupakan sebagai kegiatan sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Untuk melihat apakah pengawasan itu dapat berjalan maksimal, disini akan diteliti bagaimana Fungsi Pengawasan Camat untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas kerja pegawai di kecamatan Kawangkoan kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dimana pengambilan data lapangan atau objek penelitian data dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi dengan tujuan langsung kelapangan. Hal ini dilakukan ditempat atau obyek penelitian melalui observasi, wawancara dan kuesioner, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi yang ada. Presentasi data itu harus diiringi dengan pengolahan agar dapat diberikan penafsiran yang kuat dan objektif. (Hardani Nawawi dan Mimi Martini, 1994).

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a) Variabel penelitian

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua bagian yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Yang menjadi variabel Bebas adalah metode kerja staf lengkap, Sementara variabel Terikat adalah fungsi pengawasan camat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai di kecamatan Kawangkoan kabupaten Minahasa.

b) Definisi Operasional

Secara Operasional Pengawasan seorang camat selaku kepala satuan kerja di kecamatan yang mana menjadi point dari pengawasan itu adalah menyangkut pelayanan public atau pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat, camat selaku atasan hams bias mengawasi pegawainya untuk melayani masyarakat dengan se-profesional mungkin dengan didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 menyangkut kewajiban

seorang pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 mengenai larangan bagi pegawai negeri, diantaranya: Disiplin kerja pegawai (datang dan pulang tepat waktu); Melayani masyarakat dengan profesional/berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan; Memeriksa datar hadir pegawai; Memeriksa setiap pegawai yang rangkap jabatan; Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi/ golongan; Tidak menggunakan jabatannya untuk melakukan pungutan liar bahkan membantu seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan jabatannya; Tidak menggunakan barang milik Negara untuk kepentingan pribadi dan golongan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara; Bekerja dengan jujur, cermat dan penuh semangat; Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap ramah terhadap masyarakat; Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Hal inilah yang menjadi indikator dari poin-poin pengawasan yang dilakukan camat selaku atasan terhadap aparaturnya atau bawahannya sehubungan dengan pengawasan yang akan dilakukannya. Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu (Syarifudin, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah Camat dan pegawai kantor kecamatan Kawangkoan.

Sampel adalah bagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian (Narbuko, 2002). Menurut Syarifudin (2002) sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi, sehingga sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi juga dimiliki oleh sample. Penentuan

sampel responden dilakukan secara purposive sampling dimana penulis/peneliti menentukan atau memilih secara sengaja terhadap sampel responden yaitu para staf yang ada dalam struktur organisasi serta merupakan pegawai tetap di kantor Kecamatan Kawangkoan yaitu masing-masing: Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pelayanan Umum, dan 10 orang dari kantor kelurahan sehingga berjumlah 17 orang.

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian baik data sekunder maupun data primer maka ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Data primer, merupakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pada variabel penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara secara terpimpin terhadap sampel responden.
- 2) Data sekunder, data yang diperoleh melalui pencatatan data-data statistik yang ada di kantor Kecamatan Kawangkoan.

E. Teknik Analisa Data

Dengan demikian teknik analisa dilakukan secara Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan dengan cara menggambarkan dalam bentuk uraian kata-kata dan kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Camat Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai

Dalam upaya menghindari masalah yang akan muncul dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja pegawai dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan pemimpin yang mempengaruhi perilaku para pegawai/bawahannya sehingga mereka secara

sukarela menyerakkan seluruh potensi dan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

Kesediaan seorang pegawai untuk bekerja ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor kepemimpinan dan motivasi yang dimilikinya. Sedangkan motivasi ditentukan oleh keinginan dan kebutuhannya, dimana kebutuhan pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain serta dapat berubah dan berkembang dalam kurun waktu tertentu. Selain kedua faktor diatas prestasi kerja yang tinggi juga turut ditentukan oleh penilaian atau kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi pegawai 'atau aparat pemerintah sehingga dapat melahirkan sikap dan perilaku bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Tetapi tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh setiap pemimpin, lebih-lebih dalam kehidupan dunia modern yang ditandai dengan bermacam-macam gejala seperti volume kerja yang selalu meningkat, interaksi manusia yang lebih kompleks, tuntutan sumberdaya manusia dan sebagainya. Jadi mengingat betapa pentingnya peranan pemimpin dalam menggerakkan organisasi maka menjadi kewajiban utama bagi setiap pemimpin untuk selalu secara terus-menerus berusaha mengamati dan memahami tingkah-laku bawahan.

Berhubungan dengan hal diatas, maka pemerintah selaku panutan dan abdi masyarakat harus mampu meningkatkan kinerjanya, agar fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public and good services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari penyimpangan-penyimpangan lainnya.

Semuanya itu hanya dapat diwujudkan dengan baik kalau pemimpin melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya atas kegiatan bawahan dan organisasi yang dipimpinya. Pengawasan yang dimaksud disini adalah Pengawasan Melekat dimana melakukan pengawasan atau pengendalian yang pasti terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan fungsi manajemen yang lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pengawasan melekat merupakan kewajiban yang harus dijalin oleh setiap pimpinan atau atasan dalam pelaksanaan satuan organisasi pemerintah pada umumnya. Singkatnya, pengawasan atasan langsung yang dilaksanakan dengan menjalankan pengawasan melekat merupakan fungsi seorang pimpinan yang harus dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga memakai rumus dasar yang 'bisa menentukan prosentase dari data yang telah dihasilkan dengan rumus

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Ket : P= Prosentase

F= Frekuensi

N= Jumlah

Sampel Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam bekerja, apakah atasan memberikan program rencana kerja untuk dilaksanakan dan dari hasil diatas menunjukkan bahwa 32,29 % responden

pegawai menyatakan selalu, 64,70 responden/ pegawai menyatakan kadang-kadang.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner kepada seluruh staf, pegawai yang menyatakan camat selalu menyusun program kerja masih kurang jika dibandingkan dengan yang menyatakan kadang-kadang mungkin karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh para pegawai akan program yang direncanakan oleh atasan yaitu camat sehingga mereka menyatakan penyusunan program kerja oleh camat masih kadang-kadang.

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pegawai yang bekerja sesuai dengan prosedur bidang tugas, dari hasil di atas maka dapat dilihat 70,58 % menyatakan ya, sedangkan yang menjawab kadang-kadang sebesar 29,41 %. Dalam hal ini berarti pelaksanaan tugas bisa tercapai dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan data diatas responden yang menyatakan melakukan tugas sesuai dengan bidang begitu banyak dikarenakan akan penyusunan struktur kerja yang dibuat oleh atasan sudah baik dalam memberikan tugas pada stafnya sedangkan yang sisanya menyatakan masih kadang-kadang karena mungkin mereka masih merasa kurang puas dengan bidang tugas yang mereka miliki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apakah atasan sering memberikan evaluasi kerja terhadap kinerja pegawai. Hasil diatas menunjukkan 35,29 % menyatakan bahwa camat selalu melaksanakan evaluasi kerja dan 64,70 % menyatakan kadang-kadang.

Dari data pernyataan responden yang mengatakan camat selalu mengadakan evaluasi kerja masih kurang, Sedangkan responden yang menyatakan camat masih kadang-kadang melakukan evaluasi mungkin karena disebabkan oleh kesibukan yang dimiliki oleh camat selaku kepala pemerintahan di kecamatan sehingga seringkali tidak melakukan evaluasi kerja terhadap bawahannya.

Hasil penelitian menunjukkan tentang pengawasan dari pimpinan menyangkut kinerja dari pada aparat dalam hal mengawasi dan meminta laporan pekerjaan dari setiap aparat berdasarkan tujuan kerja yang ditetapkan. Hasil diatas menunjukkan 11,76 % menyatakan atasan selalu meminta akan laporan kerja dan 88,23 % menyatakan kadang-kadang meminta laporan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan masih kurangnya staf yang memberikan laporan kerja pada atasan dibandingkan dengan yang menyatakan kadang-kadang mungkin dikarenakan pekerjaan telah dianggap baik atau bertepatan dengan kesibukan yang dimiliki oleh atasan sehingga tidak sempat lagi untuk memberikan laporan hasil kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dari atasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. Hasil diatas menunjukkan 35,29 % memilih bahwa atasan selalu melakukan pembinaan, 52,94 % memilih dalam melaksanakan tugas atasan kadang-kadang dalam memberikan pembinaan, dan 11,76 % memilih tidak pernah.

Tingginya frekuensi pegawai yang menyatakan atasan selalu memberikan pembinaan dalam pelaksanaan tugas, hal ini dilakukan pada setiap mengadakan apel pada pagi hari sedangkan yang kadang-kadang menerima pembinaan disebabkan oleh sering terlambatnya atau ketidakhadiran karena sakit atau berhalangan lain/ izin pegawai yang bersangkutan sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pembinaan yang di berikan oleh atasan dalam hal ini yaitu camat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan seorang atasan berjalan dengan baik karena di buktikannya dengan bentuk sanksi yang diberikan oleh atasan dalam hal ini yaitu camat sudah cukup tegas.

Dalam menerapkan kedisiplinan pegawai camat memberikan sanksi berupa

teguran lisan pada bawahannya yang sering terlambat datang ke kantor, sering bolos atau tidak masuk kantor juga pulang sebelum waktunya.

Berbagai upaya pembinaan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja, antara lain dengan memberikan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, peningkatan pendidikan dan latihan, promosi jabatan dan lain-lain, namun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab belum cukup memuaskan. Pada kenyataannya suasana kurang kerjaan akibat tidak adanya program kerja yang dibuat kebanyakan menunggu apa yang menjadi masalah dalam masyarakat, pemborosan waktu, sikap masa bodoh terhadap pekerjaan yang lebih parahnya lagi ada beberapa pegawai yang hanya bermain ketangkasan.

Untuk menanggulangi yang terjadi diatas Maka selain sanksi maka perlunya juga ada pujian dan penghargaan bagi pegawai yang benar-benar melaksanakan tugasnya, agar setiap pegawai yang kurang disiplin dapat termotivasi dengan pemberian pujian atau penghargaan dari atasannya.

Hasil penelitian menggambarkan akan pemberian pujian dan penghargaan seorang atasan kepada bawahannya, dan dapat dilihat dari responden yang menjawab selalu 52,94 %, sedangkan yang menjawab kadang-kadang yaitu 29,41%, dan yang menjawab tidak pernah 17,64 %.

Dalam menilai hasil kerja dari pada stafnya camat dinilai selalu memberikan pujian dan penghargaan terhadap hasil kerja stafnya walaupun ada juga yang menyatakan kadang-kadang mungkin karena hasil kerja mereka masih kurang.

Jadi camat selaku pimpinan di kantor kecamatan harus mampu memberikan pujian dan penghargaan yang nyata pada pegawainya untuk lebih merangsang lagi agar para pegawai dapat bekerja dengan semaksimal mungkin

dan dengan begitu maka akan terciptanya peningkatan kinerja yang baik.

B. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Pegawai

Aparatur pemerintah merupakan pusat kegiatan penegakan hukum secara baik dan benar, sangat diperlukan aparat pemerintah yang berkomitmen tinggi demi terselenggaranya efisiensi dan efektifitas kerja pegawai.

Sehubungan dengan itu berarti juga mutlak diperlukan upaya penertiban terhadap berbagai kasus penyimpangan dan pelanggaran hukum yang berlangsung di lingkungan birokrat yaitu berupa pelanggaran disiplin, pungutan liar, kompsi, menerima bingkisan, menerima suap komersialisasi jabatan, penyalahgunaan wewenang, makanya perlu dilakukan pengawasan secara terpadu terhadap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan oleh aparatur Negara. Namun mengingat pengawasan fungsional sangat terbatas jangkauannya, maka upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas, pengawasan melekat menjadi sangat penting dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki disiplin nasional yang tinggi dan menjadi pelopor penegak hukum. Karena seperti yang di ketahui bahwa pengawasan melekat adalah merupakan peningkatan upaya peningkatan aparatur pemerintah. Pengawasan melekat dimaksudkan agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintah dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai dengan tugas, rumusan kerja pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas, berarti dengan melaksanakan pengawasan melekat secara efisien dan efektif, dapat lebih mudah dijaring tindakan yang bertentangan dengan disiplin pegawai negeri dalam peningkatan penegakan hukum dalam mewujudkan tertib hukum di lingkungan aparatur Negara Dengan kata lain setiap tindak

lanjut terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah sebagai hasil temuan pengawasan melekat, akan mendukung tertibnya hukum.

Berdasarkan atas uraian-uraian diatas, Jelaslah bahwa untuk pengawasan melekat dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur pemerintah di Kecamatan Kawangkoan, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja aparatur pemerintah mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan pengawasan melekat.

Hasil penelitian tentang produktivitas kerja aparatur pemerintah kecamatan Kawangkoan yang dilihat dari Efisiensi dan efektifitas kerja menunjukkan bahwa dari 17 responden yang dilakukan penelitian ternyata 82,35 % menyatakan selalu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang efisien tetapi tetap mengutamakan hasil yang maksimal demi kepentingan masyarakat dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang efektif. Sedangkan 17,64 % Responden menyatakan kadang-kadang menyelesaikan tugas dan pekerjaan untuk pelayanan kepada masyarakat tidak pada waktunya.

Tingginya pegawai yang menyatakan selalu menyelesaikan tugas pekerjaan dengan efektif dan efisien karena mereka memahami betul akan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai abdi negara Hanya sebagian kecil yang menyatakan kadang-kadang dikarenakan oleh alat penunjang pekerjaan yang mengalami kerusakan atau adanya pemadaman listrik sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan 70,58 % responden memilih bahwa selalu menyelesaikan tugas sesuai yang diharapkan oleh atasan, dan 29,41 % responden memilih kadang-kadang menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diharapkan oleh atasan dalam pelaksanaannya.

Dengan melihat frekuensi jawaban aparatur pemerintah kecamatan dalam

menyelesaikan tugas mereka selalu menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diharapkan oleh atasan misalnya dalam pembuatan atau penyusunan program kerja pada seksi PMD menyusun program kerja yang menyangkut dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, dari hasil kerja itu selalu sesuai dengan yang diharapkan sedangkan yang menyatakan kadang-kadang mungkin karena disebabkan oleh kurangnya pemahaman.

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa dari 17 responden Yang dilakukan penelitian ternyata 82,35 % Menyatakan bahwa sangat efektif dan efisien akan pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan lancar, dan 11,76 % Menyatakan cukup efektif dan efisien pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan lancar, sedangkan 5,88 % menyatakan kurang efektif dan efisien akan pembagian tugas karena mungkin tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau kurangnya waktu yang diberikan.

Tingginya frekuensi pegawai yang menyatakan sangat efektif dan efisien karena mereka memahami betul akan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat misalnya dalam pembuatan surat keterangan penduduk pada Kasubag umum yang dilakukan dengan waktu seefisien mungkin yang tidak membutuhkan waktu sehari-hari sedangkan yang menyatakan cukup atau kurang disebabkan karena tidak masuknya camat atau Sekcam.

Hasil penelitian Menunjukkan dengan metode kerja sekarang apakah kinerja aparat dalam hal penyelesaian pekerjaan berjalan dengan efisien dan efektif 70,58 % menyatakan sangat efektif dan efisien dan 29,41 % menyatakan cukup efektif dan efisien.

Dengan melihat data yang ada metode kerja sekarang ini sudah efektif dan efisien karena dengan melihat pembagian tugas yang ada sudah sesuai dengan basic yang dimiliki

sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas kerja dengan baik sedangkan yang menyatakan cukup itu karena mereka masih ada sedikit kekurangan tapi dapat disimpulkan bahwa metode kerja sudah efektif dan efisien.

Aparat dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan waktu dan fasilitas seefisien maka dapat dilihat 64,70 % responden lebih memilih opsi sangat efisien, 29,41% memilih cukup efisien dan 5,88% memilih kurang efisien. Dalam penyelesaian tugas pegawai kecamatan selalu menyelesaikan tugas dengan efisien karena ini melupakan kepentingan masyarakat yang selalu diprioritaskan dengan penggunaan waktu yang efisien dan dilakukan dengan adanya bimbingan dari atasan dan dengan adanya juga metode kerja yang baik sedangkan yang menyatakan cukup atau kurang disebabkan oleh fasilitas yang digunakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan _

1. Pengawasan fungsi kontrol oleh camat dalam peningkatan produktivitas kerja aparat pemerintah di kecamatan Kawangkoan yang dilakukan camat sebagai aparat pengawas di kecamatan, jika dilihat dari efisiensi dan efektifitas sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dalam pengendalian manajemen melalui organisasi, kebijakan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, serta prosedur. dimana keberhasilan pengawasan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan rencana kerja
2. Pengaruh peranan camat dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas sampai saat ini sudah baik namun masih perlu lagi untuk lebih ditingkatkan karena pelaksanaan tugas yang diemban cukup kompleks dan rumit sehingga memerlukan berbagai pemecahan masalah serta terkait dengan beberapa faktor lain yang belum maksimal diantaranya sikap mental yang masih kurang tapi apabila segala kekurangan

yang ada dapat di benahi maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai akan maksimal sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan tugas yang dilakukan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta tugas-tugas administratif lainnya.

3. Mantapnya mekanisme pemerintahan dan efektifnya pelaksanaan pekerjaan oleh aparat pemerintah kecamatan sangat menentukan akan efektif dan efisiensi hasil kerja dari pada aparat. Camat selaku seorang pemimpin harus mampu mendayagunakan para bawahannya yang ada. Oleh karena itu dalam menciptakan aparatur pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin maka semangat kerja, sikap pengabdian yang tanpa pamrih bagi aparatur pemerintah itu sangat diharapkan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab seorang camat harus melakukan pengawasan melekat atau pengawasan management agar bisa terciptanya pelayanan pada masyarakat yang maksimal sesuai yang diharapkan, camat dalam melaksanakan harus mempunyai kemampuan yang tepat, cepat, praktis dan rasional dalam pengambilan keputusan.
5. Pembinaan dan apresiasi yang tinggi oleh atasan kepada bawahan sangat menentukan akan kesediaan seorang pegawai untuk bekerja salah satu faktor yang menunjang akan efektivitas kerja pegawai ialah faktor kepemimpinan dan motivasi dari seorang camat kepada pegawainya. Selain itu kinerja yang maksimal turut ditentukan juga oleh penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi pegawai sehingga dapat melahirkan kebertanggungjawaban dalam

melaksanakan tugas-tugas yang diembankan.

B. Saran

Hendaknya pemerintah kecamatan Kawangkoan didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan hendaknya tetap melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien karena dengan demikian dapat mempermudah mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang nantinya bisa menghambat upaya peningkatan produktifitas kerja.

Dengan kata lain, pengawasan akan sangat mendukung terselenggaranya tertib hukum, karena melalui fungsi pengawasan maka semua bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihindari sedini mungkin dengan demikian dapat memperlancarkan semua tugas dan fungsi dari bagian-bagian yang ada untuk mewujudkan produktifitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadari Nawawi & Mimi Martini. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajahmada University.
- Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba. Empat.
- Narbuko Cholid. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto Sunarno. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga
- Syarifudin. 2002. Metode Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- SUMBER LAIN:
- Inpres No 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawas